Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP)
e-ISSN: 2775-9768
p-ISSN: 2777-0974
Vol. 2, No. 2, Oktober 2022
Doi: https://doi.org/10.31933/jaaip.v2i2.672

Evaluasi Pemahaman, Kecukupan SDM dan Teknologi Informasi dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual (PP 71/2010)

Asmy Febry Tama
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widyaswara Indonesia, asmy038@gmail.com

Info Artikel
Diterima, 05-10-2022
Direvisi, 25-10-2022
Dipublikasi, 01-11-2022

Kata Kunci:
Basis Akrual, Akuntansi, Pemahaman, SDM, Teknologi Informasi.

Abstrak

Perubahan peraturan basis pencatatan akuntansi dari *Cash basis* ke *Accrual basic* tidak merubah target opini yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dan dengan masa transisi lima tahun seharusnya pemerintah daerah telah mempunyai persiapan yang matang dalam menghadapi penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana Pemahaman, Kecukupan SDM, dan Teknologi Informasi dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual yang telah disiapkan Pemda Solok Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui quisioner, wawancara dan observasi yang diolah dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap PPK dan stafnya diseluruh SKPD dengan jumlah responden 88 orang. Dari hasil penelitian didapat hasil bahwa 1) PPK dan staf keuangan di kabupaten Solok Selatan 73,86% tidak paham dengan akuntansi berbasis akrual, 2) SDM yang berperan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual belum mencukupi dan 3) Teknologi informasi dalam penerapan akuntansi akrual sudah cukup memadai.

Keywords:
Accrual Basis, Accounting, Understanding, HR, Information Technology

Abstract

Changes in the rules of accounting recording basis from cash basis to accrual basis do not change the opinion target that must be achieved by local governments and with a five-year transition period, local governments should have had thorough preparation in dealing with the application of accrual-based accounting. Therefore, this study aims to determine how the understanding, adequacy of human resources, and information technology in the application of accrual-based accounting has been prepared by the local government of South Solok. This research is a qualitative research with a descriptive approach, using primary and secondary data obtained through questionnaires, interviews and observations processed by quantitative and qualitative methods. The study was conducted on PPK and its staff throughout the SKPD with a total of 88 respondents. From the results of the study, it was found that 1) PPK and financial staff in South Solok Regency 73.86% did not understand accrual-based accounting, 2) HR that played a role in the application of accrual-based accounting was not sufficient and 3) Information technology in the application of accrual accounting was sufficient. adequate.

PENDAHULUAN

Banyaknya kritikan atas pengelolaan organisasi sektor publik mendorong terciptanya reformasi manajemen sektor public (Aryanti & Prasojo, 2021). Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi dan kreativitas serta berbagai kekurangan lainnya (Widianti dkk, 2016). Pencatatan dan perhitungan keuangan yang tidak akurat akan membuat laporan keuangan yang dibuat mempunyai kualitas informasi yang rendah. Rendahnya kualitas informasi keuangan menjadikan hasil audit laporan keuangan mendapat opini yang buruk (Arih dkk, 2017). Hal ini

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

lah yang dialami oleh kabupaten Solok Selatan bahkan hampir seumur keberadaannya. Opini audit *disclaimer* nyaris tidak pernah lepas dari kabupaten ini, bahkan pada tahun 2011 menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang memperoleh opini disclaimer di Sumatera Barat.

Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Langelo dkk, 2015). Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan public (Ranuba dkk, 2015). Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Laporan keuangan 2013 menjadi tolok ukur kemajuan pengelolaan keuangan di kabupaten Solok Selatan. Hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2013 adalah WDP dengan basis pencatatan telah menggunakan *Cash to Acrual*. Saat para pembuat laporan keuangan di Solok Selatan baru mulai mengerti dengan akuntansi berbasis *cash to acrual* hingga bisa memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pemerintah melalui PP 71/2010 mengganti basis pencatatan dengan akrual dan mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkannya pada pencatatan setiap traksaksi akuntansi.

Penerapan PP 71/2010 berarti bahwa segala elemen dalam laporan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengacu kepada peraturan yang baru tujuh elemen (Laporan Realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Lamonisi, 2016).

Kesiapan adalah sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan (Kristiawati, 2015). Kesiapan untuk perubahan menurut Holt et al dalam (Pujanira & Taman, 2017) adalah sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh: apa yang sedang berubah), proses (bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu (contoh: karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasaan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status quo.

Dilihat dari opini sebelum SAP berbasis akrual diterapkan pada tahun 2015 terkait LKPD 2013 yang diaudit BPK, dimana baru 16 provinsi dan 115 kab/kota yang mendapatkan opini WTP (IHPS II Tahun 2013). Mengingat dengan basis *Cash* dan *CTA* Solok Selatan selalu mendapat opini *disclaimer* dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sampai tahun 2012 dan hanya meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2013, sementara tahun 2015 basis akrual sudah wajib diterapkan dengan target opini BPK tetap WTP, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Pemahaman, Kecukupan SDM, dan Teknologi Informasi dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual yang telah disiapkan Pemda Solok Selatan.

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku

Salah satu dari teori tersebut adalah *Teori ABC (Sulzer, Azaroff, Mayer: 1977)*. Menurut teori ini perilaku manusia merupakan sutu proses sekaligus hasil interaksi antara *Antecedent Behavior Consequences.* Sedangkan menurut Teori Kurt Lewin (1970) Perilaku manusia adalah suatu keadaan seimbang antara *driving forces* (kekuatan-kekuatan pendorong) dan *restrining forces* (kekuatan-kekuatan penahan). Perilaku dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut.

Teori *Change Management*

Change Management (CM) atau yang kemudian sering disebut sebagai manajemen perubahan merupakan pendekatan baru yang dikembangkan dan populer dalam menyelesaikan permasalahan pada setiap tatanan. Perubahan bisa bermakna melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, memasang dan menggunakan sistem baru, mengikuti prosedur-prosedur manajemen baru, menggabungkan, melakukan reorganisasi, atau terjadinya peristiwa yang bersifat mengganggu *(disruptive)* yang sangat signifikan (Davidson, 2005- Terjemahan).

Secara definisi, *Change Management* adalah sebuah proses terstruktur dan sistematis untuk membantu transisi individu, tim kerja, ataupun organisasi dari sebuah kondisi ke arah tujuan yang diinginkan. Komponen yang harus ada di dalam *Change Management* adalah : *Motivating Change*, *Creating a Vision*, *Developing Political Support*, *Managing the Transition*, *Sustaining Momentum.* Berdasarkan uraian diatas maka *Change Management* cocok digunakan dalam penataan kembali tata kelola sistem akuntansi pemerintahan, karena perlu adanya perubahan dasar pencatatan, pengelolaan kekayaan, cara pandang manajemen serta perangkat teknologi dalam menghadirkan kondisi yang lebih baik.

Teori Agensi

Berdasarkan teori agensi yang mengadopsi pendapat Jensen (1976), Hendriksen (2002) dan Scott (2009) dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai prinsipal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agen) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat.

Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauhmana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hermaningsih, 2009).

Teori *New Public Management (NPM)*

Lynn dalam Ibrahim (2013) menjelaskan bahwa *New Public Management* (NPM) merupakan sebuah paradigma baru dalam manajemen publik yang menekankan pada insentif, persaingan dan kinerja. Menurut Hood dalam Ibrahim (2013) konsep NPM memilki tujuh komponen utama yaitu : Manajemen Profesional di sektor publik , Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja, Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome, Pemecahan unit – unit kerja di sektor public, Menciptakan persaingan di sektor public, Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor public, dan Penekanan pada

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

disiplin dan penghematan lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

Menurut Bunea dalam Damayanti (2013) menggambarkan hubungan *New Public Management* dengan reformasi akuntansi di sektor publik sebagai berikut: "*New Public Management is focused on efficiency, as governments around the world are being asked to do more with less and to be fully accountable to the community for resources entrusted to them. Accounting plays a crucial role in New Public Management developments as the means by which measurements are made, achievements are documented, and negotiations take place*"

Oleh karena itu akuntansi khususnya akuntansi akrual merupakan konsep yang ada akibat munculnya NPM hal ini diperkuat oleh Watkins dalam (Sugijanto, 2002) yang menjelaskan bahwa *"Accounting is seen within this domain as an integral component of what is now termed New Public Management".* Lebih lanjut Coonnely and Hyndmen menjelaskan *"The move from cash to accruals accounting by many governments is viewed as an aspect of an ongoing New Public Management agenda designed to achieve a more business- like and performance-focused public sector".*

Akuntansi Berbasis Akrual

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006), adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan *(recording)* sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Menurut Bastian (2010), dasar akrual merupakan basis pelaporan keuangan sektor publik dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Sehingga bisa dikatakan bahwa dasar akrual telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan mengaplikasikannya dalam proses organisasi publik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Dengan dikeluarkannya PP No 71 tahun 2010 maka pemerintah diharapkan juga dapat menjalankan standar pencatanan akuntansi dengan basis akrual yang disebut SAP berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (PP No. 71/2010).

Kerangka Peemikiran

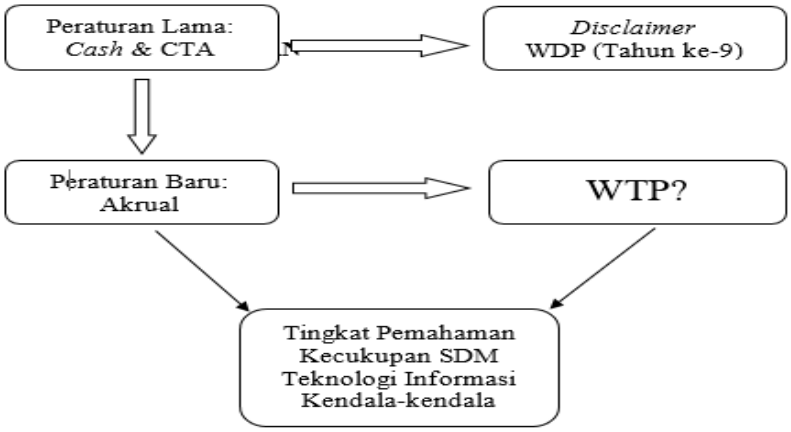
Sebelum basis akrual, pencatatan keuangan di Pemda Solok Selatan masih menggunakan basis *Cash to Acrual*, dimana dengan aturan lama itu Kabupaten ini hanya bisa meraih opini WDP untuk laporan keuangannya, setelah sebelumnya tidak pernah lepas dari opini *disclaimer*. Saat para pengelola keuangan ini baru mulai mahir dengan aturan *CTA* pmerintah mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkan basis akrual penuh.

Penerapan aturan baru semestinya diiringi dengan persiapan yang matang dari

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

penerima atau pelaksana aturan tersebut. Demikian pula dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah, khususnya pemerintah daerah Solok Selatan. Sosialisasi akan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual ini telah mulai dilakukan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2010. Lima tahun seharusnya merupakan waktu yang cukup panjang bagi pemerintah daerah untuk dapat mempersiapkan diri menyambut penerapan aturan baru ditahun 2015, baik persiapan SDM maupun fasilitas perangkat kerjanya.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual yang telah dilakukan oleh pemerintah Solok Selatan, khususnya mengenai pemahaman pengelola keuangan terhadap akuntansi berbasis akrual, kecukupan SDM yang mengelola keuangan serta teknologi informasi yang digunakan dalam penerapan basis akrual tersebut.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berguna untuk dasar pengambilan keputusan maupun untuk mengenali distribusi maupun perilaku data yang kita miliki**.** Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau publikasi dari instansi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah quisioner, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk jenis responden dilihat berdasarkan jenis kelamin, jabatan, dan umur. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	31	35.23
2	Perempuan	57	64.77
	Jumlah	**88**	**100**

Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kasubbag (PPK)	34	38,64
2	Staf	54	61,36
	Jumlah	**88**	**100**

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

1	25 - 34 tahun	44	50.00
2	35 - 44 tahun	33	37.50
3	45 - 54 tahun	9	10.23
4	≥ 55 tahun	2	2.27
	Jumlah	**88**	**100**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Solok Selatan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yang diresmikan pada 7 Januari 2004 bersama 24 kabupaten baru lainnya di Indonesia dan tiga di antaranya terdapat di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Padang Aro dengan Demografi daerah seperti peta berikut:



Gambar 1. Wilayah Kabupaten Solok Selatan

Pemahaman Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akural

Menurut (Alimbudiono, dkk. 2004) dasar akrual merupakan basis pelaporan keuangan sektor publik dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Sehingga bisa dikatakan bahwa dasar akrual telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan, hal ini sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 dimana dasar pencatatan dengan basis akrual telah wajib dilaksanakan pemerintah daerah sejak 1 Januari 2015.

Karena telah wajib dilaksanakan maka seyogyanya para aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah telah memahami bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual ini, sehingga dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAP demi terwujudnya opini audit wajar tanpa pengecualian. Pemahaman pengelola keuangan di kabupaten Solok Selatan atas penerapan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat dari beberapa table hasil pengisian yang dilakukan oleh responden seperti berikut ini:

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Berdasarkan Perolehan Skor Quisioner

No	Skor	Kategori Pemahaman	Jumlah Responden (Orang)	%
1	86 – 100	Sangat Paham	0	0
2	71 – 85	Paham	7	7,95

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

3	56 – 70	Cukup Paham	9	10,23
4	41 – 55	Kurang paham	7	7,95
5	≤ 40	Tidak Paham	65	73,86
Jumlah			**88**	**100**

Berdasarkan skor quisioner, pengelola keuangan di kabupaten ini didominasi oleh mereka yang tidak memahami akuntansi berbasis akrual. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya pengelola keuangan sebagian besar tidak berlatar belakang akuntansi, bahkan dari 33 orang PPK hanya 6 orang yang berlatar belakang akuntansi dan kebanyakan juga tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi berbasis akrual.

Tabel 3. Tingkat Pemahaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan

No	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pemahaman			Total
		Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham s/d Sangat Paham	
1	SMA	8	0	1	9
2	D-3 Akuntansi	0	0	4	4
3	D-3 Non Akuntansi	13	1	0	14
4	S-1 Akuntansi	4	1	8	13
5	S-1 Non Akuntansi	37	5	2	44
6	S-2	3	0	1	4
Total		**65**	**7**	**16**	**88**
%		**73,86**	**7,95**	**18,18**	**100**

Melihat tabel diatas jumlah pengelola keuangan yang masih tidak paham dengan akuntansi berbasis akrual masih sangat banyak, terutama bagi pengelola keuangan yang bukan dari akuntansi. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, mengingat dengan pencatatan menggunakan kas basis saja laporan keuangan daerah sering terlambat penyelesaiannya. Hal ini senada dengan pernyataan responden saat wawancara bahwa ”dalam membuat laporan keuangan kami sering kesulitan, kami hanya berusaha menyesuaikan dengan buku kas umum dan fungsional, mengikuti apa yang dikatakan DPPKAD tanpa mengikuti prosedur yang benar untuk terciptanya suatu laporan keuangan, karena kami bukan dari akuntansi dan tidak pernah mengikuti pelatihan terutama yang baru sekarang berbasis akrual. Jadi kami tidak tahu bagaimana itu jurnal ataupun buku besar, tetapi katanya aplikasi SIMDA sudah meng*cover* basis akrual jadi kami tidak terlalu khawatir”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan tingkat pemahaman pengelola keuangan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Solok Selatan sebagain besar berada pada tingkat tidak paham. Sementara tingkat pemahaman SDM jika dilihat dari tingkat pendidikan dari PPK-SKPD dan staf PPK tergambar dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 4. Tingkat Pemahaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan PPK

No	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pemahaman			Total
		Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham s/d Sangat Paham	
1	SMA	1	0	0	1
2	D-3 Akuntansi	0	0	0	0
3	D-3 Non Akuntansi	3	0	0	3

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

4	S-1 Akuntansi	0	1	5	6
5	S-1 Non Akuntansi	17	2	2	21
6	S-2	2	0	1	3
Total		23	3	8	34
%		67,65	8,82	23,53	100

PPK yang berlatar belakang D3 semuanya Non-akuntansi dan semuanya tidak paham dengan akuntansi berbasis akrual. Sisanya 1 orang tidak paham dengan akuntansi berbasis akrual dengan latar belakang SMA dan yang berlatarbelakang S2 sebanyak 3 orang, dimana 1 diantaranya berada pada tingkat pemahaman paham, hal ini karena S1 nya berasal dari akuntansi dan pernah mengikuti pelatihan akuntansi akrual walaupun hanya satu kali.

Tabel 5. Tingkat Pemahaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan Staf PPK

No	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pemahaman			Total
		Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham s/d Sangat Paham	
1	SMA	7	0	1	8
2	D-3 Akuntansi	0	0	4	4
3	D-3 Non Akuntansi	10	1	0	11
4	S-1 Akuntansi	4	0	3	7
5	S-1 Non Akuntansi	20	3	0	23
6	S-2	1	0	0	1
Total		42	4	8	54
%		77,78	7,41	14,81	100

Dipahami bahwa sebagian besar mereka yang mengelola keuangan di kabupaten Solok Selatan tidak paham dengan akuntansi berbasis akrual. Bahkan tidak ada responden yang berada pada tingkat pemahaman sangat paham. Artinya baik PPK maupun stafnya tidak ada yang benar-benar paham dengan penerapan akuntansi berbasis akrual termasuk mereka yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Tingkat pemahaman terhadap akuntansi akrual juga dapat dilihat dari pelatihan yang pernah diikuti serta masa kerja yang telah dijalani. Untuk itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Tingkat Pemahaman Berdasarkan Pelatihan Berbasis Akrual yang Diikuti

No	Jumlah Pelatihan (Kali)	Tingkat Pemahaman (Orang)			Total (Orang)
		Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham s/d Sangat Paham	
1	0	54	3	4	61
2	1	11	4	8	23
3	2	0	0	2	2
4	3	0	0	2	2
Total		65	7	16	88
%		73,86	7,95	18,18	100

Banyaknya pengelola keuangan yang tidak pernah mengikuti akuntansi berbasis akrual ini disebabkan oleh berbagai hal seperti kurangnya pelatihan yang diberikan di lingkungan tempat kerja, sementara untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak ketiga anggaran bimtek di SKPD tidak mencukupi, bahkan ada SKPD yang tidak mempunyai anggaran bimtek. Banyak PPK yang baru menjabat dan banyak staf yang baru bergabung di subbag keuangan,

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

juga menjadikan pengetahuan mereka minim tentang akuntansi berbasis akrual.

Tabel 7. Tingkat Pemahaman Berdasarkan Masa Kerja di Bagian Keuangan

No	Masa Kerja (Tahun)	Tingkat Pemahaman (Orang)			Total
		Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham s/d Sangat Paham	
1	0 - 3	23	2	3	28
2	4 - 6	26	2	6	34
3	7 - 9	10	2	4	16
4	10 – 12	6	1	3	10
Total		65	7	16	88
%		73,86	7,95	18,18	100

Dapat dilihat dari pelatihan yang pernah diikuti dan lamanya masa kerja dapat disimpulkan pengelola keuangan di kabupaten Solok Selatan masih sangat banyak yang belum paham dengan akuntansi berbasis akrual. Terlihat dari 70% pengelola keuangan tidak paham dengan penerapan akuntansi berbasis akrual.

Kecukupan SDM dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Dilihat dari usia, 87,5% pengelola keuangan berada pada usia 25 – 44 tahun, usia tersebut merupakan usia yang sangat produktif untuk bekerja. Karena kebanyakan dari mereka bukan berlatar belakang akuntansi maka diperlukan pelatihan yang lebih banyak guna peningkatan pengetahuan tentang akuntansi terutama akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan quisioner yang disebarkan 61 orang dari 88 orang responden mengaku tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi akrual. Pemerintah daerah jarang sekali melaksanakan pelatihan dan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak ketiga dana bimbingan teknis (bimtek) di SKPD sering tidak mencukupi. Jadi dilihat dari segi usia maka pengelola keuangan di Solok Selatan mempunyai usia yang mencukupi untuk bisa bekerja dengan baik dan mengelola keuangan daerah dengan bijak tentu saja harus ditunjang dengan kemampuan yang memadai.

Teknologi Informasi dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Teknologi informasi kabupaten Solok Selatan cukup siap dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang dapat terlihat dari adanya aplikasi yang dapat digunakan dalam mempermudah penerapan akuntansi berbasis akrual, tersedianya ruang entri dengan komputer yang siap pakai, adanya server aplikasi yang jangkauannya sampai ke SKPD, jaringan internet dihampir setiap SKPD dan tersedianya perangkat komputer dengan kapastitas yang baik untuk para pengelola keuangan SKPD.

Kendala-kendala Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah mestinya juga didukung oleh SDM yang handal, namun di Solok Selatan kondisi itu belum terpenuhi. Meskipun sebagian besar PPK dan staf keuangan di Solok Selatan adalah sarjana, namun hanya sebagian kecil yang berasal dari sarjana akuntansi, itulah sebabnya banyak PPK dan staf keuangan yang tidak faham dengan akuntansi berbasis akrual, juga tidak mengerti dengan mekanisme penyusunan laporan keuangan.

Kurangnya pelatihan keuangan juga menjadi kendala. Hal ini dikarenakan keterbatasan

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

dana bimtek di SKPD. Sejak tahun 2012 dana bimtek yang disetujui jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya banyak pelatihan yang tidak bisa diikuti, apalagi pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang pembayaran kontribusinya cukup menguras anggaran yang ada

Hambatan lainnya adalah Seringnya Pergantian Pegawai di Bagian Keuangan dengan berbagai alasan, mutasi dan rotasi pegawai di keuangan terlalu sering dan cepat dilakukan. Sehingga saat pegawai baru mulai mengerti dan mahir mahir dengan aturan baru, dia harus pindah dan pergi membawa ilmunya. Saat pegawai baru masuk lagi di keuangan, ternyata minim pengetahuan keuangan sehingga harus diklat/bimtek lagi. Hal seperti ini membuat banyak dana bimtek menjadi mubazir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di kabupaten Solok Selatan :

1. PPK dan staf keuangan di kabupaten Solok Selatan 73,86% tidak paham dengan akuntansi berbasis akrual, hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor seperti latar belakang pendidikan yang non-akuntansi, tidak pernah mengikuti pelatihan dan masa kerja yang masih baru.
2. SDM yang berperan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual belum mencukupi terutama jumlah PPK yang mempunyai latar belakang akuntansi, sehingga banyak PPK yang tidak mengerti dan melimpahkan beban kerjanya kepada staf, ini membuat beban kerja staf bertambah berat.
3. Dari segi teknologi informasi penerapan akuntansi akrual cukup memadai, yang dapat dilihat dari kelancaran jalannya aplikasi SIMDA, server yang bisa menjangkau sampai ke SKPD-SKPD hingga lengkapnya perangkat komputer yang dapat dipakai oleh pengelola keuangan. Sehingga laporan keuangan semester I dapat disusun lebih cepat meskipun dengan pemahaman akrual yang masih sangat minim dan masih harus disandingkan dengan laporan yang dibuat secara manual.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan SDM terutama yang berlatar belakang akuntansi. Untuk SDM yang ada saat ini dibutuhkan pelatihan yang banyak mengenai akuntansi berbasis akrual, mengingat pengelola keuangan yang ada sekarang didominasi oleh tenaga non-akuntansi namun masih dalam usia sangat produktif
2. Diperlukan penambahan anggaran kegiatan bimbingan teknis, agar pengelola keuangan bisa mengupdate pengetahuannya mengenai aturan-aturan terbaru.
3. Diharapkan pengontrolan yang baik atas penggunan SIMDA baik dari segi *input, output* maupun *hardware* dan *software*nya, agar bisa digunakan untuk jangka panjang. Dan sebaiknya ada back up data agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pemerintah daerah tidak kehilangan data.
4. Mutasi atau rotasi pegawai pengelola keuangan hendaknya jangan terlalu cepat atau sering, hal seperti ini membuat biaya bimtek yang telah dikeluarkan terbuang sia-sia.

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

DAFTAR PUSTAKA

Alimbudiono, dkk. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30

Aryanti, D & Prasojo, E (2021). Manajemen Pengetahuan Pada Sektor Publik: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis 2010-2021. *Jurnal Academia Praja*. Vol 4 No 2.

Arih, T, N & Rahayu, S, & Nurbaiti, A. (2017). Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi "Pemerintah" berbasis akrual pada pemerintah kota Bandung. *Jurnal Manajemen Indonesia*. Vol 17-No.1.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Damayanti, RA. 2013. *Akuntansi Akrual dan Penerapannya di Sektor Publik: Sebuah Agenda Pembaruan*. Universitas Hasanuddin.

Davidson , Jeff. 2005. *Change Management – Terjemahan*. Prenada Jakarta.

Hendriksen, E. S.. (2002). *Accounting Theory*. Edisi 6. Richard D. Irwin Inc., Singapore

Hermaningsih. (2009). *Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.* Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro

Ibrahim, P. (2013). *Akuntansi Akrual dan Penerapannya di Sektor Publik: Telaah Pustaka. Skripsi*. Universitas Hasanuddin

Jensen. and Meckling, 1976."The Theory of The Firm : Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structur,"(Journal of Financial and Economics, 3)

Kristiawati, E. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah Kalimantan barat. *AKUNTABILITAS*. Vol VIII No 3.

Langelo, F, & Saerang, D,P,E & Alexander, S, W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol 3 No 1.

Lamonisi, S. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Ambon. *Jurnal EMBA*. Vol 4 No. 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pujanira & Taman, (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*. Vol VI No 2.

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Ranuba, E, D,S, & Pangemanan, S, & Pinatik, S. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada DPKPA Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. Vol 3 No 1.

Scott, W. R. 2009. *Financial Accounting Theory*. 5thEdition. Toronto: Prentice-Hall

Sugijanto. 2002. *Peranan sistem akuntansi Pemerintah Pusat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999*. Lintasan Ekonomi. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66.

Widianti, H, & Hadiyati, S, N, & Sulistyowati, D. (2016). *Analisis Faktor-faktor Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Sektor Pemerintah*. SENIT 2016.

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)